

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Sesudah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia hanya memiliki tiga daerah khusus atau istimewa, yaitu Yogyakarta, Aceh dan Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh menjadi istimewa karena kesejarahan dan peran dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, Yogyakarta memiliki hubungan langsung dengan pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Hal ini tidak lepas dari peran serta Yogyakarta pada masa penjajahan Belanda yang pernah dijadikan ibukota sementara sehingga Republik Indonesia dapat terus berlanjut hingga kini.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata istimewa dalam Undang-Undanganya, yakni UU Nomer 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun mempunyai landasan hukum, Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta belum juga disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan rapat kabinet 26 November 2010, pemerintah telah menyepakati keistimewaan Yogyakarta diantaranya; Parardhya (lembaga yang terdiri dari Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai symbol, pelindung, penjaga budaya, pengayom, serta pemersatu), kultur atau adat, kepemilikan dan pengolahan tanah, tata ruang dan keuangan. Hanya saja permasalahan prosedur pemilihan kepala daerah yang masih belum disepakati.

Pemerintah belum menentukan sikap soal mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena tidak ingin melanggar UUD 1945 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala daerah pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dan Ayat (7) menyatakan, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. (Kompas, 6 Desember 2010)

Berdasarkan UUD 1945 pemerintah berpedoman bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis bukan penetapan. Secara garis besar, pemerintah tidak menginginkan adanya sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. Hal ini dikemukakan karena sistem pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebelumnya dilakukan tanpa pemilihan langsung tetapi ditetapkan turun temurun yaitu pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Paku Alam VIII.

Menanggapi wacana pemerintah yang menawarkan konsep pemilihan pada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, timbul pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Yogyakarta mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena penetapan kepala daerah dianggap tidak melanggar asas demokrasi selama diatur dalam UUD 1945.

Pasal 18B Ayat (1) dalam UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ayat (2) Pasal 18B juga menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Kompas, 6 Desember 2010)

Demokratis prosedural yang dikemukakan oleh pemerintah ini tidak melihat subyek masyarakat yang sesungguhnya bahwa sebenarnya penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah menyuarakan sebagian dari aspirasi masyarakat kota Yogyakarta. (Kompas, 2 Desember 2010)

Kontribusi dukungan penetapan ditunjukkan dengan dihadapinya sidang paripurna terbuka di DPRD DIY Senin (13/12) oleh sebaaiaan besar masyarakat Yogyakarta. Sebanyak 6.500 pedagang Pasar Beringharjo menghentikan aktivitasnya selama satu hari penuh. Tidak ada satu pun pedagang menggelar dagangannya. Sebagian pedagang memilih ikut menghadiri sidang paripurna terbuka di DPRD DIY. (Kedaulatan Rakyat, 14 Desember 2010)

Aspirasi ribuan warga yang tumpah ruah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD DIY ini kurang mendapat penghargaan yang positif dari pemerintah pusat. Wacana ini menguat dengan munculnya pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang menilai aksi demo yang menghendaki jabatan Gubernur dan Wakil gubernur DIY ditentukan melalui mekanisme penetapan, hanya merupakan aksi sebagian kecil masyarakat Jogja.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dinilai meremehkan aspirasi ribuan warga Yogyakarta. Gamawan mendapat kecaman dan dituding gagal menjalankan amanah sebagai pejabat negara saat merespon aspirasi dan sikap masyarakat Yogyakarta. Pernyataannya dinilai telah merendahkan rakyat DIY dan mencederai demokrasi.

Peneliti memilih judul penelitian yaitu Pemberitaan Pernyataan Mendagri tentang Aspirasi Masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY pada Surat Kabar Harian Kompas.

Surat kabar yang dipilih oleh peneliti adalah surat kabar harian Kompas. Motto Kompas yaitu “Amanat Hati Nurani Rakyat”, sehingga memosisikannya sebagai media menjalankan fungsi kontrol sebagai wadah disuarakannya suara rakyat. Selain karena Kompas menjadikan berita mengenai pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai salah satu isi beritanya, peneliti

menilai Kompas sebagai surat kabar nasional sudah mempunyai nama besar dan dapat dipercaya keakuratan berita-beritanya.

Peneliti menjadikan penelitian lain sebagai acuan, seperti dalam penelitian skripsi B. Satrio Pinandhita (2010) berjudul Studi Analisis Framing terhadap berita film Fitna pada Majalah Tempo periode Maret-April 2008. Penelitian ini didasarkan pada film garapan Geertz Wilders, seorang anggota parlemen di Belanda yang diyakini telah memojokkan umat Islam. Pemunculan film ini menimbulkan berbagai kontroversi karena menyangkut isu agama yang sangat sensitif. Berita dalam Majalah Tempo membantu penulis mengetahui pandangan Majalah Tempo terhadap film Fitna. Meski dinilai sebagai film yang berkualitas rendah, namun Tempo menguatkan kecenderungan dengan menampilkan frame mayoritas umat Islam yang menolak kekerasan, tidak seperti realitas yang hendak dibangun pada film Fitna. Begitu pula dalam penelitian mengenai pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY. Peneliti hendak melihat bagaimana frame yang ditampilkan Kompas dalam pemberitaannya.

Skripsi lain yang menjadi acuan peneliti yaitu skripsi Kartini Rolitta Sibarani (2010) berjudul Analisis Framing pemberitaan rencana penutupan lokalisasi Lembah Harapan Baru KM. 17 Balikpapan pada SKH Kaltim Post. Penelitian ini hendak melihat bingkai realitas yang dibangun oleh Kaltim Post mengenai rencana penutupan lokalisasi LBH KM. 17. Rencana penutupan LBH KM. 17 ini sempat menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan masyarakat. Kaltim Post membingkai berita bahwa LBH KM. 17 Balikpapan memang harus ditutup karena telah berjalan tidak sesuai dengan fungsi awalnya yakni sebagai tempat rehabilitasi bagi para PSK dan keberadaannya dinilai sebagai sumber penyakit masyarakat. Sebagai media lokal, Kaltim Post juga bersikap mendukung rencana Pemkot Balikpapan untuk melakukan penutupan.

Sedangkan pada penelitian Ike Pratiwi (2010) yang berjudul Studi Analisis Framing Berita Seratus Hari Kinerja Presiden SBY-Boediono di Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas 27-29 Januari 2010 membandingkan antara konstruksi dua media massa. Penelitian ini membahas berita-berita tentang Seratus Hari Kinerja Presiden SBY-Boediono yang menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Dampak dari polemik tersebut adalah penilaian masyarakat dalam seratus hari kinerja pemerintahan tersebut pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas pemberitaan tentang Momentum Seratus Hari Kinerja Presiden SBY-Boediono. Hasil penelitian dari Jawa Pos yaitu pemerintahan 100 hari SBY-Boediono dinilai belum berhasil memberikan terobosan dan fondasi yang kuat untuk melangkah lima tahun ke depan. Sedangkan pada Kompas diperoleh hasil penelitian yaitu sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat mengkritik program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Penelitian ini menggunakan dua media massa sebagai pembanding dalam membingkai realitas suatu isu.

Masyarakat dalam merepresentasikan realitas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pembingkai berita, pembaca diarahkan untuk membangun suatu wacana mengenai pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh media. Kompas menjadikan berita mengenai pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai salah satu isi beritanya.

Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana SKH Kompas membingkai pemberitaan ini dan bagaimana sikap SKH Kompas dalam pemberitaan mengenai pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembingkai SKH Kompas dalam pemberitaan pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui *frame* yang digunakan redaksi SKH Kompas dalam membingkai pemberitaan pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat akademik**

Memberikan sumbangsih pengetahuan bagi penelitian analisis media menggunakan analisis framing. Penelitian digunakan untuk mengetahui tataran tekstual media yang cenderung bersifat tersembunyi dalam isi pemberitaan di media massa khususnya media cetak.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa berita yang ada dalam media massa bukan hanya semata-mata merupakan realitas atau fakta yang terjadi. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dan tidak serta merta menerima tataran isi pada pemberitaan media massa.

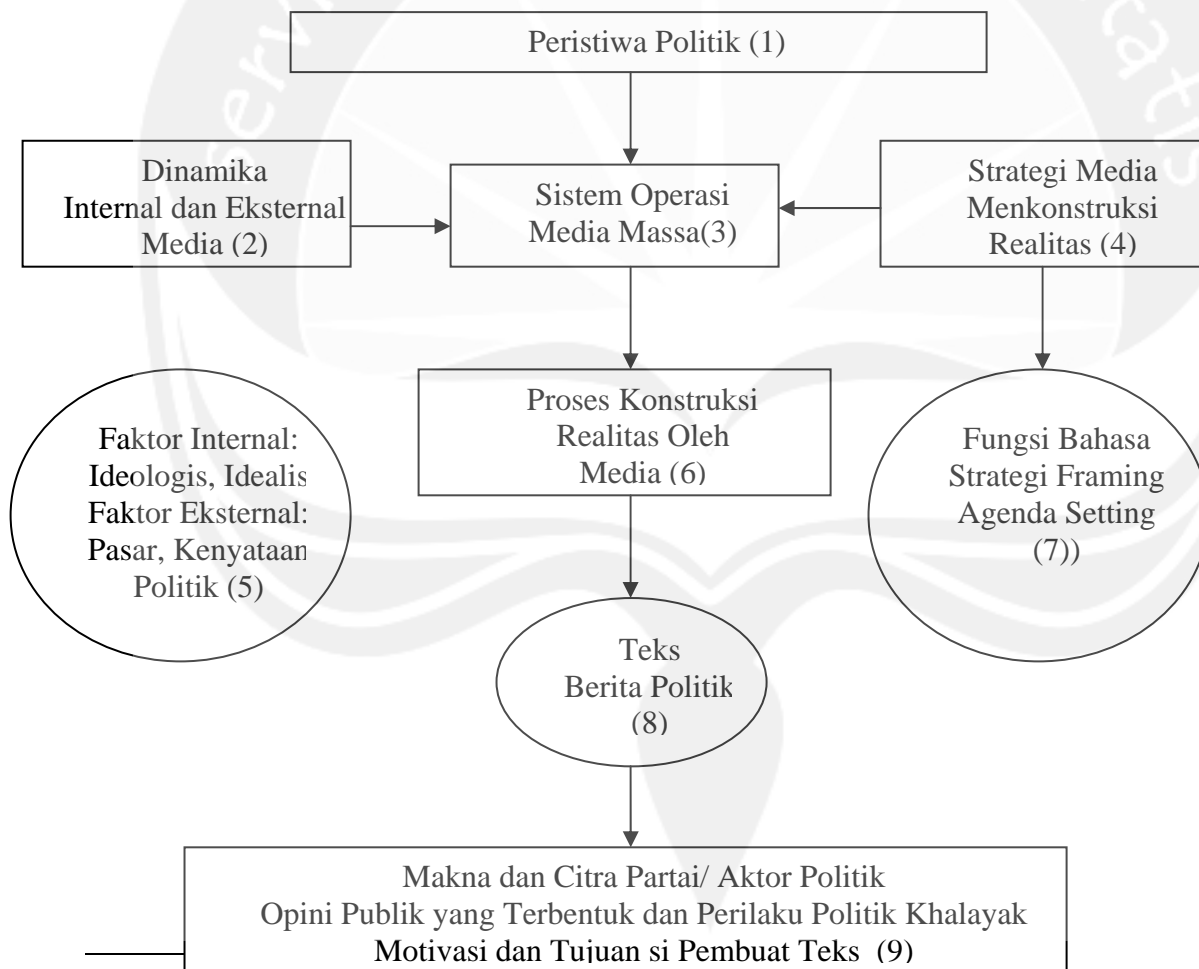
## **E. Kerangka Teori**

Setiap penelitian memiliki pola kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat

pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti.<sup>1</sup> Kerangka teori dalam penelitian ini dipakai sebagai perangkat yang digunakan penulis untuk membantu memaknai data penelitian.

Fungsi dari teori ini sendiri adalah membantu peneliti membantu menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya serta memberikan ketajaman analisis peneliti akan masalah yang akan diteliti.<sup>2</sup> Penjelasan mengenai teori dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bagan berikut:

**Gambar 1:** Kerangka Kerja Teori (Theoretical Framework) Studi Liputan Politik<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 39

<sup>2</sup> Kriyantono, Rachmad. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 43

<sup>3</sup> Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Edisi Pertama. Jakarta: Granit. Hal. 5

Secara global, bagan 1 menjelaskan lahirnya berita politik (8) senantiasa dimulai dengan peristiwa politik (1) baik yang menyangkut organisasi maupun aktor politik. Pengkontruksian realitas politik (6) hingga membentuk makna dan citra tertentu (9) pertama-tama tergantung pada faktor sistem media massa yang berlaku. Proses pembuatan berita politik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal media (2) dan (5) serta perangkat pembuatan wacananya sendiri (4) dan (7).<sup>4</sup>

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) dapat digunakan untuk melihat proses dibentuknya wacana politik oleh masing-masing media. Bahkan, dapat pula dijadikan bahan pertimbangan sikap tiap media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik.

Pada penelitian ini, kerangka teoritis studi liputan politik digunakan peneliti untuk melihat bagaimana SKH Kompas membingkai berita politik mengenai pernyataan Mendagri tentang dukungan warga DIY pendukung penetapan kepala daerah sebelum dijadikan teks berita politik. Melalui sistem operasi media massanya Kompas mengkonstruksi realitas yang terjadi untuk menuju arah pemahaman atau membentuk makna tertentu. Pengkontruksian realitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya dinamika faktor eksternal dan internal media serta perangkat pembuatan wacananya sendiri yang diperoleh melalui pemingkaian berita (*framing*).

Dalam mempermudah pemahaman penelitiannya, peneliti membagi beberapa pokok bahasan landasan berpikir sebagai berikut;

### **E.1 Framing sebagai Pendekatan Paradigma Konstruksionis**

---

<sup>4</sup> Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Edisi Pertama. Jakarta: Granit. Hal. 6



Memilih paradigma penting dilakukan oleh peneliti agar penelitiannya dapat menempuh alur berfikir yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Paradigma merupakan pandangan yang mendasar dari ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.

Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana harus menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

*The structure of this book reflects the fact that there are two main schools in the study of communication. The first sees communication as the transmission of messages. It is concerned with how senders and receivers encode and decode, with how transmitters use the channels and media of communication. The second school sees communication as the production and exchange of meanings. It is concerned with how messages, or text, interact with people in order to produce meanings; that is, that is concerned with the role of texts in our culture.*<sup>5</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Intoduction to Communication Studies*, John Fiske melihat suatu realitas dapat dipahami dengan dua cara: *pertama*, komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Pandangan ini juga disebut sebagai pandangan positivistik. *Kedua*, komunikasi dilihat sebagai produksi pesan dan pertukaran makna atau disebut juga pandangan konstruksionis.

Dalam ilmu komunikasi secara tidak langsung terdapat dua paradigma besar yaitu pandangan efek media yang melihat komunikasi sebagai sebuah pandangan efek media dalam mentransmisikan pesan atau lazim dengan sebutan paradigma positivistik dan paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna atau lazim disebut paradigm konstruksionis.

Paradigma positivisme melihat komunikasi sebagai proses pengiriman pesan yang membahas tentang bagaimana pengirim dan penerima mengirim dan menerjemahkan pesan.

---

<sup>5</sup> Fiske, John. 1990. *Intoduction to Communication Studies*. Second Edition. London New York: Routledge. Hal. 2.

Pengirim selaku pusat pesan menyampaikan tanda komunikasi kepada penerima kemudian diterjemahkan oleh penerima pesan. Terjadi hubungan timbal balik antara pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Proses transmisi pesan dikatakan berhasil jika pesan yang diterima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sumber pesan.<sup>6</sup>

Pandangan selanjutnya adalah melihat proses komunikasi tidak hanya terpaku pada bagaimana proses tersebut berjalan tetapi melihat bagaimana pesan yang dihasilkan dan diproduksi oleh sumber pesan dalam prosesnya komunikasinya menghasilkan makna. Makna tercipta lewat konstruksi terhadap pesan yang disampaikan baik oleh komunikator maupun komunikan. Pemaknaan komunikasi berbeda-beda karena dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman komunikasi yang berbeda sesuai dengan pola dan peta kognitif individu yang bersangkutan.

Menurut Fiske, dalam pandangan produksi dan pertukaran makna ini penyampaian pesan tidak hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan, tetapi pesan itu sudah dipengaruhi oleh realitas yang berada diluar pesan itu. Pesan tidak dilihat secara linear, tetapi dinamis. Terdapat pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam. Peneliti menggunakan paradigma produksi dan pertukaran makna atau yang biasa disebut dengan paradigma konstruksionis dengan menggunakan analisis framing sebagai metode penelitian.

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Realitas kehidupan sosial dipandang sebagai hasil konstruksi bukan realitas natural. Realitas dalam hal ini dihadirkan sebagai sesuatu yang muncul direka-reka, tidak hadir dengan sendirinya.

---

<sup>6</sup> Fiske, John. 1990. *Intoduction to Communication Studies*. Second Edition. London New York: Routledge. Hal. 4

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya<sup>7</sup>.

## **E.2 Konstruksi Realitas Sosial (Berita) pada Sebuah Media.**

Media massa pada dasarnya merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan pada media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu<sup>8</sup>.

Pekerjaan media massa pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya<sup>9</sup>. Fenomena atau sebuah peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dianggap mempunyai nilai berita inilah yang akan dikonstruksi ulang oleh media sebelum diberitakan kembali.

Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial dalam pandangan mereka tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan<sup>10</sup>. Pada kenyataannya media massa tidak hanya sekedar memberikan gambaran akan suatu peristiwa, tetapi ada serangkaian proses produksi didalamnya yang ikut mempengaruhi isi pesan dalam media.

---

<sup>7</sup> Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda. Hal. 162

<sup>8</sup> JB. Wahyudi. 1991. *Komunikasi Jurnalistik*, Alumni, Bandung, hal. 90

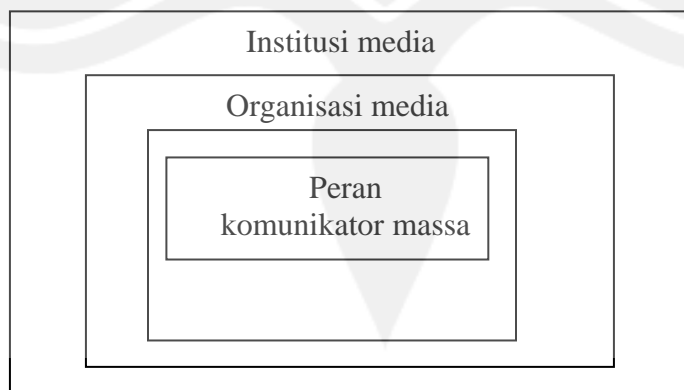
<sup>9</sup> Alex Sobur. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda. Hal. 90

<sup>10</sup> Ibid. hal. 91

Menurut pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran bebas, ia juga merupakan subyek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Media disini dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media merupakan agen yang aktif menafsirkan realitas kepada khalayak melalui berbagai instrumen yang dimilikinya. Melalui pemilihan realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa.<sup>11</sup>

Denis Mc Quail dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa* menemukan tahapan lain untuk mengidentifikasi jenjang analisis yang digunakan untuk memahami produksi media. Dimmick dan Coit mengidentifikasi sembilan jenjang penerapan pengaruh dan kekuasaan. Beberapa diantaranya ialah: supranasional (badan atau perusahaan internasional); jenjang masyarakat (misalnya pemerintahan); jenjang industri (misalnya perusahaan media yang bersaing dan hubungannya dengan pemasang iklan); supraorganisasi (jaringan atau kelompok); jenjang komunitas (misalnya kota kecil, masyarakat lokal, dan kelompok usaha niaga); kelompok intraorganisasi yang formal ataupun informal. Secara sederhana hubungan institusi, organisasi dan peran media sebagai berikut;

**Gambar 2:** Hubungan institusi, organisasi, dan peran media<sup>12</sup>  
Masyarakat



<sup>11</sup> Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS. Hal. 19-20

<sup>12</sup> Mc Quail, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. Erlangga: Jakarta. Hal. 139

Dalam buku McQuail menurut pandangan Gerbner (1969) digambarkan bahwa para komunikator massa dalam situasi yang tertekan, karena menghadapi berbagai kekuatan dari luar terutama yang berasal dari klien. Beberapa hubungan organisasi media ditengah-tengah kekuatan sosial:

1. Hubungan dengan masyarakat.

Maksudnya yaitu, didalam penyampaian media massa harus mempunyai sasaran organisasi didalam media, yang sesuai dengan keadaan masyarakat, serta harus menjadi pemihak atau netralitas di dalam masyarakat.

2. Hubungan dengan klien, pemilik, dan pemasok.

Maksudnya yaitu, kita harus benar-benar bisa memperhatikan berbagai macam kasus yang ada disekitarnya, terutama terhadap yang bersangkutan langsung dengan permasalahan di dalam media.

3. Hubungan dengan sumber.

Maksudnya yaitu, bahwa kita harus bisa memilih dari sekian banyak pengarang atau seniman untuk menentukan publikasi, serta melakukan pengamatan terhadap pengumpulan informasi.

4. Hubungan internal organisasi media.

Maksudnya yaitu, sejauh mana kita didalam menganalisis hubungan organisasi media dengan badan diluar media yang memberikan kesan adanya kesatuan dalam tubuh organisasi.

5. Hubungan audiens.

Maksudnya yaitu, klien merupakan sumber yang utama didalam mencari sebuah berita dilingkungan sekitar.<sup>13</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **F.1 Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah wartawan SKH Kompas, Mawar Kusuma dan Bambang Sigap Sumantri, selaku editor multimedia. Subyek penelitian tersebut terlibat dalam pembuatan artikel mengenai pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY.

### **F.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis kualitatif dimana data-data yang diuraikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan atas topik yang hendak diteliti. Penjelasan tersebut meliputi level teks media sekaligus kebijakan redaksi SKH Kompas.

Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Laporan dengan jenis penelitian ini dipenuhi dengan deskripsi, detail penuh warna, dan sifat-sifat tidak formal, dan tidak diisi dengan nada-nada laporan netral. Laporan ini memberi perasaan pada pembaca mengenai pelbagai peristiwa dan orang-orang tertentu dengan latar sosial yang konkret<sup>14</sup>.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif mampu memberikan rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif. Rincian kompleks yang dimaksud

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 142-161

<sup>14</sup> Septian, Santana. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Obor, hal. 15

menjelaskan secara lebih dinamis dalam penuturan detail yang mendalam. Tidak seperti pada penelitian kuantitatif yang sifatnya lebih kaku dan sistematis. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu.

### **F.3 Deskripsi Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini adalah teks-teks asli berupa kumpulan artikel yang ada pada SKH Kompas edisi 13, 14, 15 dan 17 Desember 2010. Artikel tentang pernyataan Mendagri ditemukan dalam pemberitaan SKH Kompas pada 4 edisinya secara berturut-turut. Artikel ini ditemukan pada *headline* berita edisi 14 Desember 2010 dan 3 edisi lainnya terdapat pada rubrik khusus sub Keistimewaan DIY. Selain dengan artikel tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembuat wacana artikel mengenai pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY.

## **G. Data Penelitian**

### **G.1 Jenis Data**

- Data Primer

Data primer merupakan data langsung oleh peneliti dari sumbernya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data primer adalah teks asli yang berupa artikel-artikel ada pada rubrik laporan khusus pada SKH Kompas dan wawancara dengan pembuat artikel. Artikel tersebut antara lain:

---

<sup>15</sup> Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. 2002. Hal. 82

**Tabel 1**

Artikel Kompas

| No | Edisi            | Judul Artikel                             | Penulis                                |
|----|------------------|---|--|
| 1  | 13 Desember 2010 | Ribuan Orang akan Hadiri Sidang Paripurna | RWN/ WKM/ EDN/ ENG/ NTA                |
| 2  | 14 Desember 2010 | Yogyakarta Tentukan Sikap                 | RWN/ PRA/ WKM/ ARA/ ENG/ NTA/ SIE/ EDN |
| 3  | 15 Desember 2010 | Warga Kecewa Tanggapan Pusat              | RWN/ WKM/ NTA/ INK                     |
| 4  | 17 Desember 2010 | Yogyakarta yang Panaskan Paripurna        | Susie Berinda/ Anita Yossihara         |

Data primer berikutnya yaitu wawancara dengan perangkat pembuat berita. Perangkat pembuat berita pada artikel diatas adalah Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik dan editornya yaitu Bambang Sigap Sumantri.

o Data sekunder

Data sekunder di dapat dari makalah, skripsi dan sumber arsip lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah skripsi-skripsi yang menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif dan yang menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis framing.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada wartawan, editor, pemimpin redaksi atau individu yang terkait lainnya. Peneliti melakukan wawancara dengan wartawan Mawar Kusuma Wulan Kuncara Manik dan editor Bambang Sigap Sumantri. Selain itu data penelitian juga diperoleh dari sumber tertulis lainnya yakni artikel dari surat kabar lain yaitu SKH Kedaulatan Rakyat, laporan penelitian sejenis dan



dokumen artikel-artikel yang diperoleh dari internet tentang dengan pernyataan Mendagri tentang aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dukungan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam sidang paripurna DPRD DIY.

## **I. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam permasalahan ini adalah analisis framing. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana. Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.<sup>16</sup>

### **I.1 Analisis Framing**

Dalam menganalisis peneliti menggunakan model analisis framing yang merupakan model analisis untuk mengungkapkan hal-hal tersembunyi atau tidak diungkapkan dibalik berita yang dibuat oleh media. Framing tentu saja bukan hanya berkaitan dengan bagaimana wartawan memasukkan pemikirannya dalam pembuatan berita namun juga bagaimana media melalui kerangka kerja dan rutinitas media mengolah fakta dan realitas menjadi sebuah berita.

Dalam framing terdapat dua aspek. Aspek pertama yaitu memilih fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta didasarkan pada asumsi, seorang wartawan tidak mungkin melihat suatu peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta, ini selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*)<sup>17</sup>. Kedua, proses penulisan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta dipilih itu ditulis dan kemudian ditampilkan kepada

---

<sup>16</sup> Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda. Hal. 162

<sup>17</sup> Eriyanto 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS, hal 68-69

khalayak. Pemilihan fakta kemudian ditonjolkan dengan menggunakan perangkat yang membantu, diantaranya penempatan berita tersebut, pengulangan atau penekanan, pemakaian grafis atau gambar pendukung, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya dan sebagainya<sup>18</sup>

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar; seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dbuangnya<sup>19</sup>. Pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang akan ditonjolkan melibatkan nilai dan ideologi para jurnalis yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

Framing didefinisikan sebagai metode penyajian suatu realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya<sup>20</sup>.

## **I.2 Perangkat Framing**

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas berita. Pertama model Pan dan Kosicki yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani.

Dalam buku Alex Sobur berjudul Analisis Teks Media, Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki melalui tulisan mereka *Framing Analysis: An Approach to News Discourse*

---

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 70

<sup>19</sup> Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosda, Hal. 163.

<sup>20</sup> *Ibid*. Hal. 165.

mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide.

Analisis framing pada dasarnya merupakan proses seleksi dan saliansi. Perangkat framing Pan dan Kosicki menunjukkan secara jelas pembagian perangkat operasionalnya dengan dua struktur besarnya yaitu struktur seleksi dan struktur saliansi. Seleksi dan saliansi merupakan aspek yang terdapat dalam teks berita.

Proses analisis data dimulai dengan cara melakukan analisis struktur skriptural terlebih dulu. Struktur skriptural melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. Dalam analisis struktural juga melihat narasumber siapa yang dipilih dan dilibatkan sebagai pelantun maupun pelibat wacana. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis tematis struktur yang berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Dari analisis struktur skriptural dan tematis ini maka akan diketahui sub *frame* seleksi. Temuan ini memperlihatkan frame pemilihan fakta yang dilakukan pembuat wacana atau media terhadap suatu berita.

Setelah analisis seleksi dilakukan maka tahapan berikutnya ialah analisis saliansi atau penonjolan. Analisis saliansi dilakukan dengan melakukan analisis pada struktur sintaksis yang berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Struktur sintaksis ini bisa diamati

dari bagan berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).<sup>21</sup>

Kemudian analisis dilakukan pada struktur retorik dan berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Pada analisis ini pengamatan dilakukan pada pemakaian kata, idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu. Hasil dari struktur saliansi ini kemudian menjadi sub *frame* saliansi yang memperlihatkan *frame* penonjolan fakta yang dilakukan pembuat wacana atau media pada peristiwa tersebut.

Melalui analisis *frame* seleksi dan saliansi maka ditemukan media *frame*. Media *frame* merupakan gabungan dari analisis kedua *frame* yaitu *frame* seleksi dan *frame* saliansi. Kedua *frame* inilah yang akan menunjukkan atau menjawab bagaimana *frame* yang dilakukan media terhadap peristiwa melalui beritanya.

Secara sederhana kerangka framing Pan dan Kosicki digambarkan dalam skema berikut ini:

**Tabel 2**

Skema Pan dan Kosicki

| STRUKTUR                        | PERANGKAT FRAMING | UNIT YANG DIAMATI                       |
|---------------------------------|-------------------|---|
| SINTAKSIS                       | Skema berita      | <i>Headline, lead</i> , latar informasi |
| Cara wartawan<br>menyusun fakta |                   | kutipan, sumber, pernyataan,<br>penutup |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SKRIP</b><br><br>Cara wartawan<br>mengisahkan fakta   | Kelengkapan berita   | 5W + 1H                              |
| <b>TEMATIK</b><br><br>Cara wartawan menulis<br><br>Fakta | 1. Detail<br>2. Maksud kalimat, hubungan<br>3. Nominalisasi antarkalimat<br>4. Koherensi<br>5. Bentuk kalimat<br>6. Kata ganti | Paragraf, proposisi                  |
| <b>RETORIS</b><br><br>Cara wartawan<br>menekankan fakta  | 1. Lesikon<br>2. Grafis<br>3. Metafor<br>4. Pengandaian  | Kata, idiom, gambar/ foto,<br>grafik |

Sumber: Sobur. *Analisis Teks Media*. 2006